



Risalah Kebijakan

Nomor 1, Februari 2021

Bantuan **Kuota Internet** dan Implikasinya bagi Pengalaman **Belajar Mengajar**

Ringkasan Temuan

- Sebagian besar pendidik dan peserta didik pada satuan pendidikan formal telah terjangkau bantuan kuota internet Kemendikbud, sedangkan pada satuan pendidikan non-formal PKBM bantuan kuota belum menjangkau sebagian besar calon penerima.
- Besaran kuota internet secara umum dinilai cukup, namun skema pembagian kuota belajar dan kuota umum dianggap kurang fleksibel sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai variasi kebutuhan pembelajaran.
- Dibandingkan mereka yang belum menerima bantuan kuota internet, para pendidik dan peserta didik penerima kuota internet terbukti memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih berkualitas dan kontekstual.



Konteks

Penutupan sekolah menjadi solusi darurat yang tidak dapat dihindarkan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Di Indonesia, lebih dari 60 juta peserta didik dari semua jenjang pendidikan melakukan pembelajaran dari rumah karena penutupan sekolah tersebut. Pembelajaran jarak jauh ini hanya akan terlaksana jika terdapat sarana komunikasi yang memadai. Internet adalah sarana komunikasi utama di era digital ini. Siswa yang mengalami hambatan mengakses internet selama pandemi cenderung mengalami kesulitan dalam belajar (Li dan Lalani, 2020).

Sayangnya tidak semua memiliki akses pada internet, baik karena alasan ekonomi maupun geografis. Survei Kemendikbud pada Mei 2020 mendapatkan bahwa 39% siswa dan 69% guru melaporkan bahwa jaringan dan kuota internet merupakan hambatan utama pembelajaran jarak jauh (Zamjani dkk., 2020). Untuk mengatasi hal tersebut pada bulan Oktober 2020, pemerintah merilis subsidi kuota bagi seluruh pendidik dan peserta didik di Indonesia. Kebijakan subsidi kuota internet semacam ini juga diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia dan Turki (Sajida dan Ranjani, 2020).

Dalam konteks Indonesia, bantuan kuota internet ini ditransfer kepada nomor telepon seluler masing-masing individu dengan besaran yang bervariasi sesuai jenjang pendidikan. Kuota terdiri dari dua skema, yaitu kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat mengakses seluruh laman, sedangkan kuota belajar hanya dapat mengakses laman tertentu yang memuat konten pembelajaran.

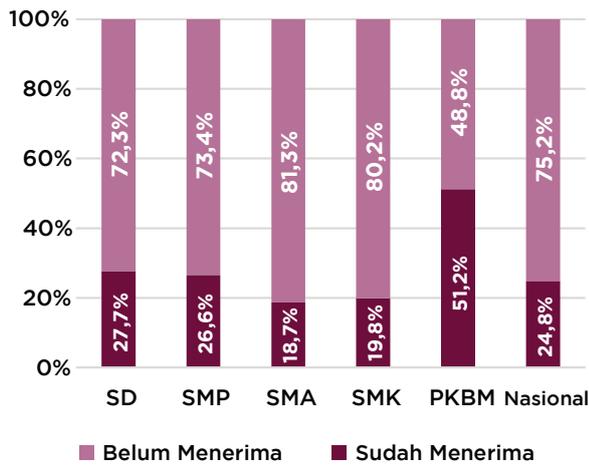
Bantuan kuota ini diharapkan dapat membuat guru dan siswa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran selama pandemi. Para guru dan siswa diharapkan memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar daring secara lebih optimal.

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) bekerja sama dengan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud melakukan survei yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan kuota tersebut. Survei dilakukan secara daring dan menyasar guru dan siswa pada jenjang dasar dan menengah baik dari jalur formal maupun non-formal (SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM). Metode sampling dilakukan secara acak bertingkat. Responden dari survei ini berjumlah 11.306 guru dan 25.799 siswa dari perwakilan satuan pendidikan negeri dan swasta di 34 provinsi. Survei dilakukan pada 13 November sampai 17 Desember 2020.

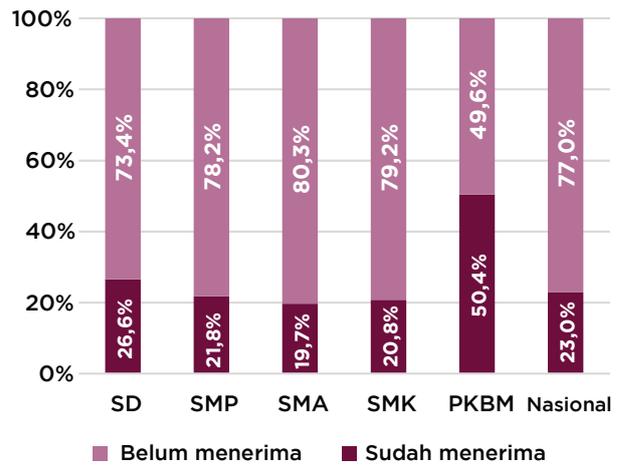
Besaran bantuan kuota internet dinilai cukup, namun skema pembagian kuota umum dan kuota belajar dianggap kurang fleksibel

Bantuan kuota internet telah diterima oleh sebagian besar guru dan siswa secara nasional, terutama pada jalur pendidikan formal. Untuk jalur non-formal, baik guru maupun siswa sebagian besar melaporkan belum menerima bantuan tersebut. Isu pendataan menjadi kendala utama distribusi kuota pada satuan pendidikan non-formal ini. Sedangkan pada jalur pendidikan formal proses pemutakhiran data melalui sistem data pokok pendidikan (Dapodik) telah berjalan relatif lebih baik.

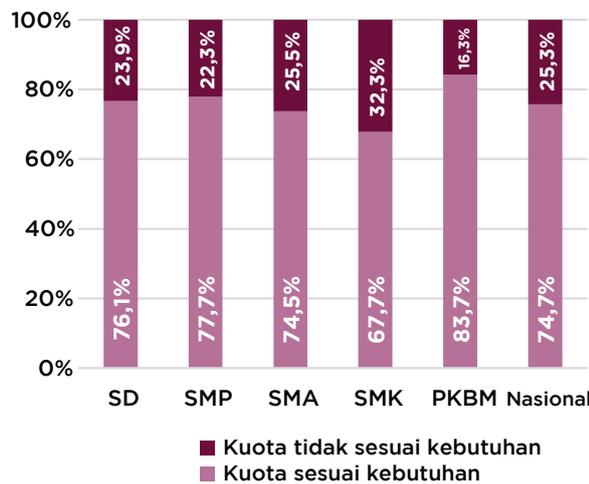
Mengenai bantuan kuota sendiri, sebagian besar siswa (75%) maupun guru (68%) secara nasional mengaku bahwa bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mereka. Hal ini diakui oleh responden pada semua jenjang dan jalur. Pada peserta didik dan pendidik di PKBM, persepsi tentang kesesuaian dengan kebutuhan ini paling tinggi dibandingkan yang lain. Sementara itu, siswa dan guru SMK secara konsisten juga menunjukkan persepsi kebutuhan yang lebih rendah dibandingkan jenjang lain. Hal ini diakui karena pembelajaran di SMK sangat membutuhkan praktik yang mengandalkan kehadiran secara fisik dibandingkan pembelajaran virtual.



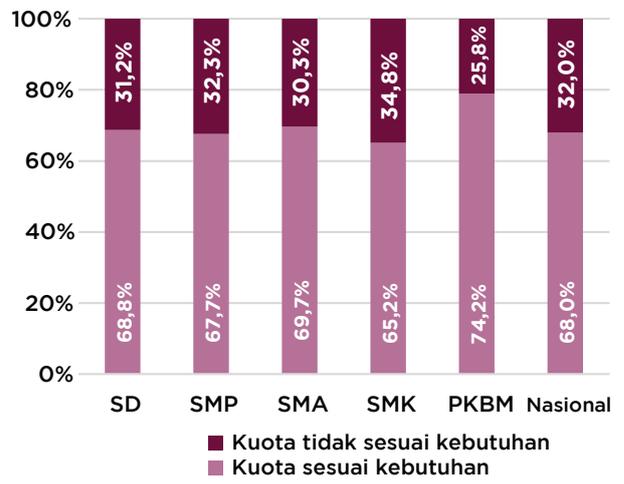
Grafik 1. Persentase siswa yang menerima bantuan kuota menurut jenjang



Grafik 2. Persentase guru yang menerima bantuan kuota menurut jenjang

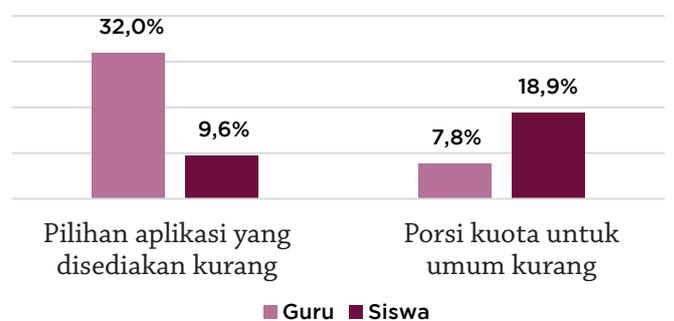


Grafik 3. Persepsi siswa penerima kuota tentang kesesuaian besaran kuota dengan kebutuhan



Grafik 4. Persepsi guru penerima bantuan kuota tentang kesesuaian besaran kuota dengan kebutuhan

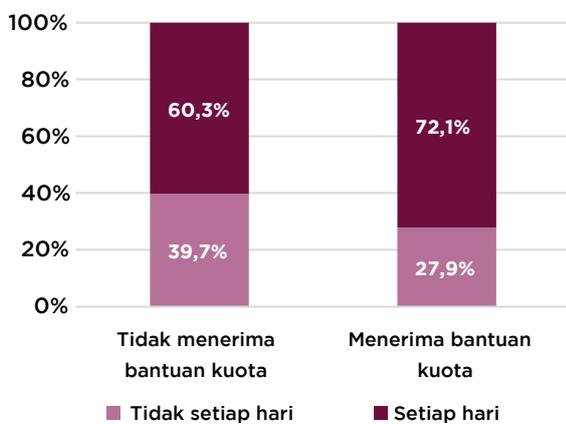
Para guru penerima bantuan kuota yang menganggap bahwa besaran kuota tidak sesuai kebutuhan terutama menekankan alasan bahwa pilihan aplikasi yang disediakan dalam kuota belajar kurang variatif. Sementara itu, para siswa penerima bantuan kuota yang menganggap besaran kuota belum sesuai kebutuhan lebih menyoroti kurangnya porsi kuota umum. Meski tidak dinyatakan oleh mayoritas penerima bantuan kuota, penting untuk mempertimbangkan fleksibilitas skema bantuan kuota agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, beberapa pembatasan tetap perlu dilakukan agar kuota tersebut tetap dapat digunakan untuk mengakses internet secara sehat dan sesuai kebutuhan pembelajaran.



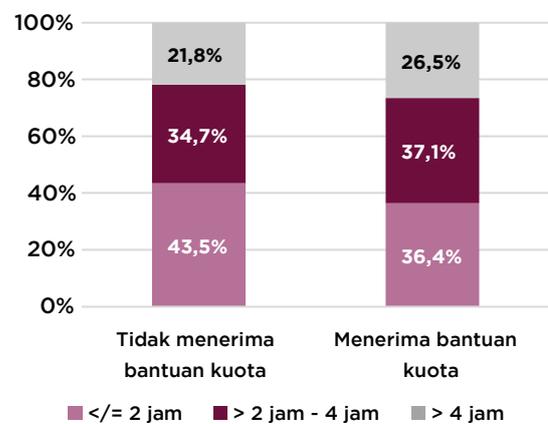
Grafik 5. Alasan penerima bantuan kuota yang mengatakan besaran kuota tidak sesuai kebutuhan

Siswa penerima bantuan kuota internet memiliki pengalaman belajar yang lebih kontekstual

Meningkatkan konektivitas internet adalah salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembelajaran di Indonesia (Gupta dan Khairina, 2020). Hasil kajian kami menunjukkan bahwa bantuan kuota internet ini memiliki implikasi yang nyata terhadap pengalaman pembelajaran siswa maupun guru. Para siswa yang memperoleh bantuan kuota terbukti memiliki intensitas belajar yang lebih dibandingkan yang belum memperoleh bantuan kuota. Proporsi siswa penerima bantuan kuota yang belajar setiap hari lebih tinggi (72%) dibandingkan mereka yang belum menerima bantuan kuota (60%). Selain itu, para siswa penerima kuota juga umumnya belajar relatif lebih lama dalam sehari dibandingkan mereka yang belum menerima kuota. Sebanyak 64% penerima kuota internet belajar lebih dari dua jam dalam sehari, sedangkan proporsi siswa yang belum menerima kuota dengan lama belajar yang sama adalah 56%.

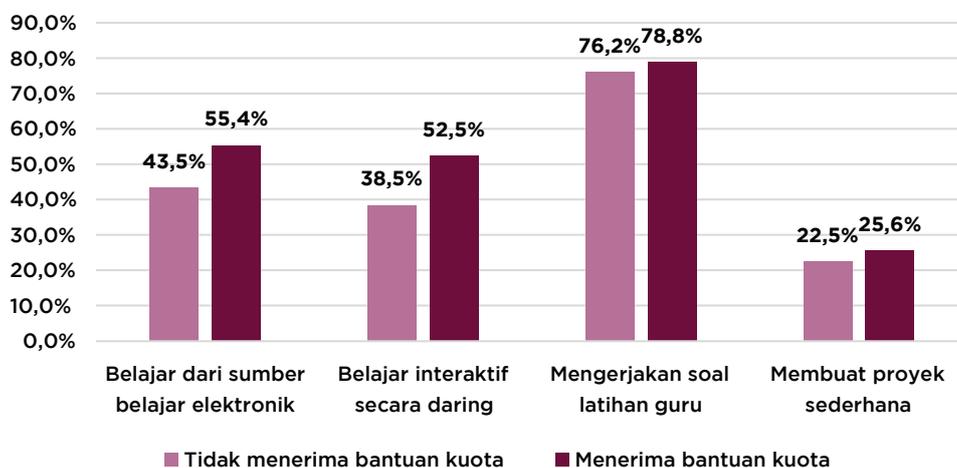


Grafik 6. Frekuensi siswa belajar dalam seminggu menurut penerimaan bantuan kuota



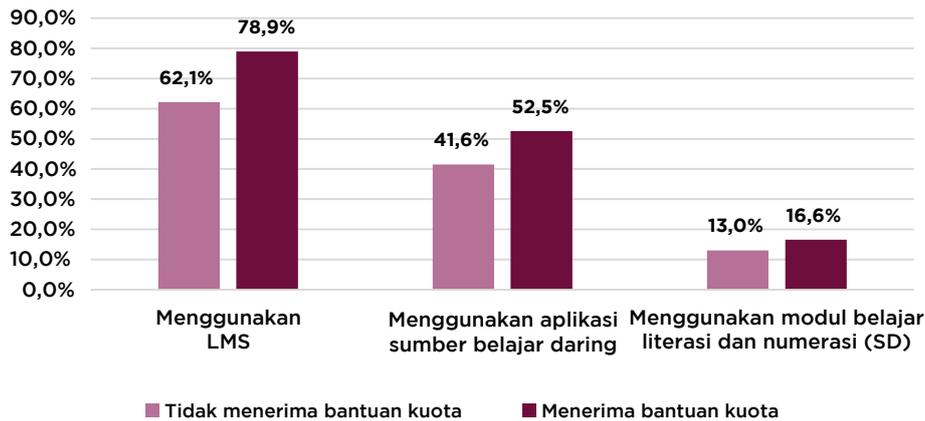
Grafik 7. Lama siswa belajar dalam sehari menurut penerimaan bantuan kuota

Para siswa penerima bantuan kuota juga menunjukkan cara belajar yang lebih variatif dibandingkan mereka yang belum menerima. Meskipun pembelajaran konvensional melalui latihan soal masih dominan pada kedua kelompok siswa baik penerima maupun bukan penerima bantuan kuota, pembelajaran yang lebih kontekstual lebih dominan dilakukan oleh mereka yang sudah menerima bantuan kuota. Dalam hal pemanfaatan sumber belajar digital, misalnya, sebagian besar penerima kuota (55%) melakukannya, hal yang hanya dilakukan oleh 43% siswa bukan penerima kuota. Demikian halnya pembelajaran interaktif secara daring yang sudah dilakukan 52% penerima kuota dan hanya dilakukan oleh 38% siswa bukan penerima kuota.



Grafik 8. Proporsi siswa menurut cara belajar dan penerimaan bantuan kuota

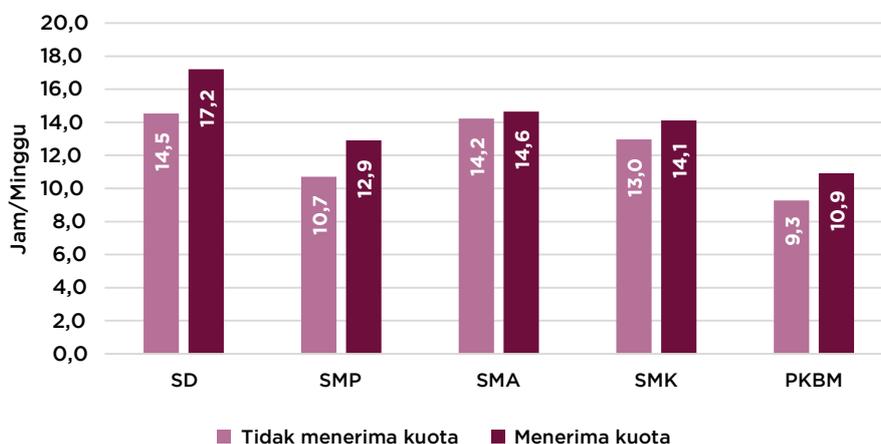
Karena penggunaan cara belajar yang lebih variatif dan kontekstual, para penerima bantuan kuota juga lebih dominan dalam pemanfaatan berbagai media belajar dibandingkan bukan penerima kuota. Proporsi mereka lebih dominan dalam pemanfaatan aplikasi kelas daring (*learning management system/LMS*), aplikasi sumber belajar daring, dan modul belajar literasi dan numerasi (khusus SD). Sedangkan bagi siswa yang belum menerima kuota, meski mayoritas (62%) masih dapat memanfaatkan LMS, namun kurang dari sebagian (42%) yang dapat memanfaatkan aplikasi sumber belajar daring seperti Rumah Belajar, Ruangguru, Zenius, dan sebagainya. Untuk dapat mengakses aplikasi sumber belajar daring ini memang dibutuhkan kuota cukup besar karena banyak memuat *file* berukuran besar seperti video dan gambar.



Grafik 9. Proporsi siswa menurut pemanfaatan media belajar dan penerimaan bantuan kuota

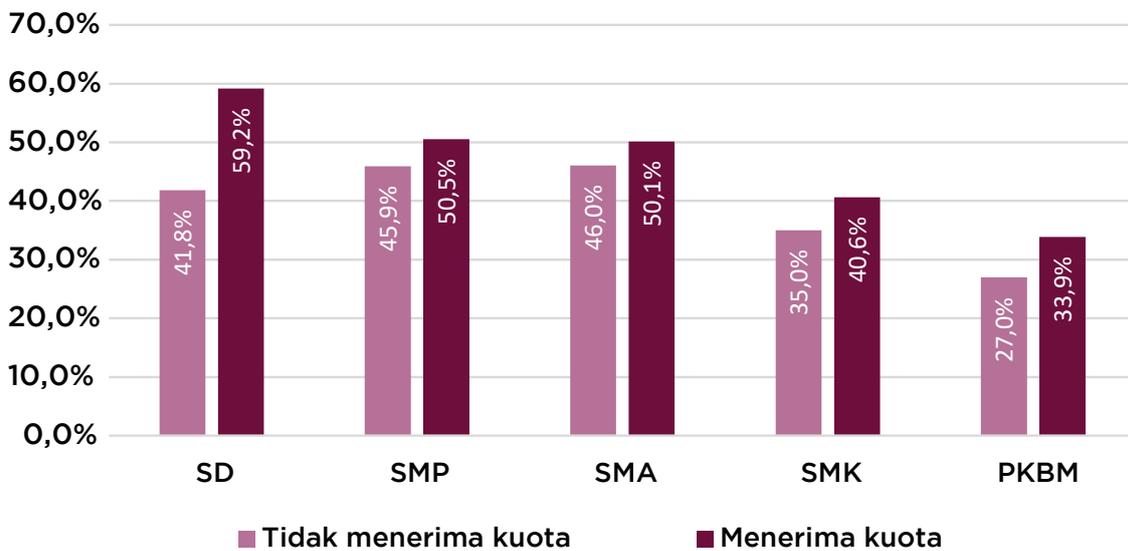
Guru penerima bantuan kuota internet dapat mengajar secara lebih interaktif

Bantuan kuota juga membawa implikasi bagi pengalaman pembelajaran guru. Sebuah studi menunjukkan bahwa siswa cenderung mengerjakan tugas yang diberikan guru dan guru tetap menjalin komunikasi dengan siswa dan orang tua jika mereka memiliki akses internet di rumah (Stelitano dkk., 2020). Hal yang sama ditemukan dalam kajian ini. Guru-guru yang memperoleh bantuan kuota umumnya memiliki waktu berinteraksi dengan siswa untuk pembelajaran lebih lama dibandingkan yang tidak mendapatkan bantuan kuota internet. Yang sangat kelihatan terutama pada guru SD, di mana guru yang memperoleh bantuan kuota memiliki waktu interaksi sepanjang 17,2 jam dalam seminggu atau selisih hampir 3 jam lebih lama dibandingkan guru yang belum memperoleh bantuan kuota (14,5 jam/minggu). Pada jenjang yang lain, kecenderungannya juga demikian meskipun dengan selisih yang lebih pendek.



Grafik 10. Proporsi siswa menurut cara belajar dan penerimaan bantuan kuota

Selain lama mengajar, bantuan kuota juga berimplikasi pada perbedaan cara mengajar guru. Meskipun semua guru mengandalkan cara pembelajaran konvensional dengan memberikan latihan soal, namun banyak guru telah melakukan pembelajaran secara interaktif melalui pemanfaatan media daring. Media daring yang dimaksudkan di sini adalah aplikasi *learning management system* dan aplikasi *video conference*. Proporsi guru yang melakukan pembelajaran interaktif secara daring lebih banyak pada mereka yang telah memperoleh bantuan kuota dibandingkan yang belum. Meski kecenderungannya sama, namun implikasi ini sangat jelas terlihat pada guru jenjang SD. Guru SD yang belum memperoleh bantuan kuota hanya 42% yang menerapkan pembelajaran interaktif secara daring. Namun, guru SD yang memperoleh bantuan kuota sebagian besar dari mereka (59%) telah menerapkan pembelajaran interaktif melalui media daring.



Grafik 11. Proporsi guru yang melakukan pembelajaran interaktif secara daring menurut penerimaan bantuan kuota

Selain itu, pada guru-guru penerima bantuan kuota terdapat kecenderungan di mana semakin rendah jenjang pendidikan semakin besar proporsi guru yang memanfaatkan media daring untuk pembelajaran interaktif. Sebaliknya pada guru-guru yang belum menerima bantuan kuota, berlaku kecenderungan lama di mana pemanfaatan media daring untuk pembelajaran interaktif terutama terjadi pada jenjang yang lebih tinggi.

Rekomendasi

Menindaklanjuti berbagai temuan di atas perlu direkomendasikan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperbaiki sistem pemutakhiran data satuan pendidikan non-formal

Para pendidik dan peserta didik PKBM banyak yang belum menerima bantuan kuota internet, padahal persepsi mereka tentang kebutuhan kuota internet paling tinggi dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, sistem pemutakhiran data untuk satuan pendidikan non-formal perlu diperbaiki secara berkelanjutan agar semakin banyak pendidik dan peserta didik pada jalur ini yang terjangkau layanan bantuan kuota. Jika diperlukan, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbud dapat menerapkan sistem insentif untuk meningkatkan partisipasi satuan pendidikan dalam memutakhirkan data pendidik dan peserta didiknya.

2. Membuat skema bantuan kuota internet yang lebih fleksibel

Kemendikbud perlu membuat skema bantuan kuota internet yang lebih fleksibel sehingga kuota yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima sesuai kebutuhan. Skema bantuan kuota sebaiknya bersifat tunggal dan dapat digunakan mengakses semua konten pembelajaran yang dibutuhkan. Meskipun demikian, skema bantuan ini perlu membatasi akses pada laman dan aplikasi yang dapat mengganggu aktivitas dan konsentrasi belajar seperti media sosial tertentu, game online, dan laman yang memuat konten terlarang (termasuk yang telah diblokir oleh Kemenkominfo).

3. Membantu mereka yang belum terjangkau bantuan kuota

Bantuan kuota internet terbukti dapat membantu guru dan siswa penerima memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih berkualitas dibandingkan mereka yang belum menerima bantuan. Oleh karena itu, perhatian lebih khusus perlu diberikan bagi mereka yang belum memperoleh bantuan kuota. Kemendikbud dapat menyampaikan data guru dan siswa yang belum terjangkau bantuan kuota kepada dinas pendidikan dan kepala satuan pendidikan agar dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan alternatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Bantuan dapat berwujud penyediaan jaringan internet publik, pemberian kuota internet dari dana BOS, penyediaan sumber-sumber belajar cetak atau digital non-daring, pemberian pelatihan, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Gupta, Deepali dan Khairina, Noviandri. (2020). "COVID-19 and Learning Inequity in Indonesia: Four Ways to Bridge the Gap." World Bank Blog, 21 Agustus 2020.
<https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learning-inequities-indonesia-four-ways-bridge-gap>. Diakses pada 23 Januari 2021
- Li, Cathy dan Lalani, Farah. (2020). The COVID-19 Pandemic Has Changed Education Forever. World Economic Forum, 29 April 2020.
<https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/>. Diakses pada 30 Januari 2021.
- Sajida dan Ranjani. (2020). Examining the Internet Quota Subsidy Policy in Indonesia. *LAPA Proceedings Conference*, Desember 2020, p. 298-319, ISSN 2686-6250.
<https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/view/411>. Diakses pada 29 Januari 2021.
- Stelitano, Laura, Sy Doan, Ashley Woo, Melissa Kay Diliberti, Julia H. Kaufman, dan Daniella Henry. (2020). The Digital Divide and COVID-19: Teachers' Perceptions of Inequities in Students' Internet Access and Participation in Remote Learning. *RAND Research Report, 2020*. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA134-3.html. Diakses pada 27 Januari 2021
- Zamjani, Irsyad, Rakhmah, Diyan N, Azizah, Siti Nur, Pratiwi, Indah, Hijriani, Ika, Hidayati, Sri. (2020). *Mengatasi Risiko Belajar dari Rumah*. Risalah Kebijakan. Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud.
https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-dari-rumah. Diakses pada 28 Januari 2021



Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Penelitian Kebijakan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827

Tim Penyusun

**Irsyad Zamjani
Meni Handayani
Siti Nur Azizah
Siska Lismayanti
Joko Purnama**

